

Warta Konservasi Lahan Basah

Vol 21 No. 1, Januari, 2013



WETLANDS
INTERNATIONAL

“Bur, Nden, Sem Mikindewa Membow” Tanah, hutan dan laut dilindungi untuk hari depan

sebuah pembelajaran tentang kearifan tradisional masyarakat
Distrik Abun, Kab. Sorong, Papua

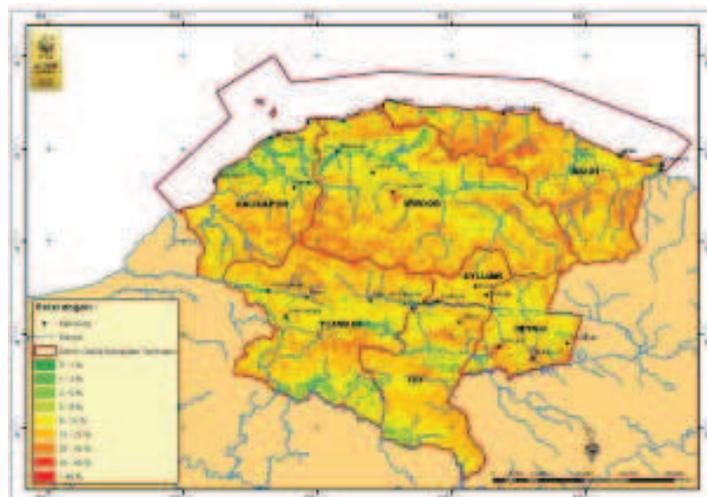
Oleh:

Freddy Pattiselanno¹, Yusuf Burako², Bastian Maryen², Kartika W. Zohar³ & Stenly Wairara³

KKLD UNTUK SIAPA?

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Abun Jamursba-Medi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sorong, Nomor : 142 tahun 2005 dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-III/1999, merupakan satu diantara dua belas KKLD di Papua yang dikelola secara aktif dengan tujuan memberdayakan masyarakat setempat dalam usaha pengelolaan sumberdaya pesisir. Luas kawasan 169.158 ha terdiri atas 69.372 (41 %) daratan dan 99.786 ha (59%) perairan laut (**Gambar 1**) merupakan pantai berpasir yang ekstensif dan hutan dataran rendah pesisir yang berfungsi sebagai habitat peneluran penyu belimbing (*Dermodochelys coriacea*).

Habitat peneluran penyu ini terbentang sepanjang pesisir pantai mulai dari desa Werur di distrik Sausapor hingga ke desa Waiben di distrik Abun. Penyu belimbing *D. coriacea* diketahui sebagai salah satu jenis penyu laut dengan tingkat keterancamannya yang tinggi di dunia. Kekhususan lain dari wilayah ini diketahui sebagai habitat peneluran penyu terbesar dibandingkan dengan habitat peneluran lain yang terdapat di dunia. Oleh karena itu Pemerintah



Gambar 1. Kawasan KKLD dan kondisi ketinggian wilayah
(Sumber: WWF)

Daerah (PEMDA) Kabupaten Sorong menetapkan kawasan ini sebagai KKLD yang selain melindungi biota laut yang tingkat keterancamannya cukup tinggi, juga mendukung keikutsertaan masyarakat setempat sebagai pemilik ulayat, pengguna sumberdaya melalui program pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengelolaan kawasan ini.

INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN KKLD

Sebagai kelanjutan survey yang kami lakukan di Kepala Burung

Papua sejak bulan Agustus 2011 (WKLB Vol. 20 No. 2 Edisi 2012), pada bulan Juli-Agustus 2012 yang lalu, kami melakukan perjalanan ke Distrik Abun untuk mengevaluasi dampak akses terhadap pemanfaatan satwa liar kaitannya dengan pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat pesisir.

Dalam kegiatan dimaksud kami bukan hanya mewawancarai masyarakat setempat, tetapi juga melakukan diskusi dan tukar pikiran seputar pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat khususnya mereka yang berdiam di sekitar kawasan konservasi laut. Hal ini dilakukan karena menurut

pemikiran kami akses terhadap sumberdaya laut bagi mereka yang bermukim di sekitar KKLD diatur sesuai dengan aturan yang berlaku dan disepakati bersama para pihak yang berkepentingan “*stakeholder*.”

Pengamatan kami selama di lapang menunjukkan bahwa masyarakat yang berdomisili di pesisir distrik Abun lebih banyak menggantungkan kehidupan mereka kepada hasil pertanian/perkebunan dengan pola hidup meramu atau melakukan aktivitas perburuan. Hasil buruan bukan saja dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga menjadi sumber penghidupan keluarga. Namun demikian ada juga sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai karyawan pertambangan PT Akram Resource di desa Warmandi. Karena itu kami simpulkan sementara bahwa pemanfaatan sumberdaya laut oleh masyarakat secara langsung sangat kecil atau sangat terbatas.

Hal menarik yang kami catat selama survey adalah model pemanfaatan sumberdaya pesisir dengan sistem bagi hasil. Sebagai contoh ketika kami berada di Desa Waibem (**Gambar 2**), nelayan dari luar kawasan (umumnya masyarakat nelayan asal Buton dari Manokwari) yang datang mencari ikan di desa tersebut dengan periode waktu tertentu misalnya seminggu, mereka membayar sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat pemilik ulayat.

Dalam situasi seperti ini, pemahaman fungsi dan peran KKLD termasuk sumberdaya yang dikandung seyogianya juga dipahami mereka yang datang untuk mengumpulkan hasil di perairan sekitar kawasan KKLD. Jika yang menjadi sasaran pemahaman hanyalah nelayan setempat padahal yang paling sering melakukan aktivitas pengumpulan



Gambar 2. Perahu nelayan di Pantai Waibem (Foto: Freddy P.)

dalam jumlah relatif besar adalah nelayan pendatang dari luar kawasan, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan sumberdaya yang ada.

ANCAMAN DAN TANTANGAN KKLD

Pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi kawasan tidak perlu dikuatkan, karena komitmen dan implementasi adat sebagai bagian dari kearifan tradisional mereka khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam, merupakan aturan yang tidak tertulis dan diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu semboyan mereka “*Bur, Nden, Sem Mikindewa Membow*” = **Tanah, hutan dan laut dilindungi untuk hari depan**, bukan hanya slogan kosong, tetapi juga merupakan ekspresi pemahaman dan kesepakatan bersama untuk menjaga kelestarian sumberdaya yang ada.

Namun demikian beberapa potensi yang teramati selama survey dapat menjadi ancaman serius terhadap pengembangan kawasan KKLD dan khususnya KKLD Abun yaitu berkembangnya industri pertambangan yang cukup potensial di kawasan Kepala Burung. Sampai dengan saat

ini saja operasional PT Akram Resource di desa Warmandi yang jika pengelolannya tidak diatur dengan baik dikuatkan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Potensi ancaman lainnya yaitu sektor pariwisata atau di sekitar Kepala Burung Papua lebih dikenal dengan “marine ecotourism” yang menghubungkan kawasan wisata Raja Ampat, Sorong, Manokwari dan Teluk Cenderawasih di Teluk Wondama dan Nabire. Berkembangnya sejumlah resort untuk wisatawan dan meningkatnya arus masuk dan keluar kapal pesiar di wilayah Kepala Burung Papua cepat atau lambat akan mempengaruhi kualitas kawasan sebagai kawasan konservasi laut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius yaitu isu deforestasi dan pengembangan kawasan pesisir yang dikuatkan menjadi ancaman serius lainnya terhadap kelestarian sumberdaya dan ekosistem pesisir. Beberapa tahun belakangan ini deforestasi dan pengembangan kawasan pesisir merupakan pemicu perubahan bentang alam yang walaupun tidak dapat diukur tetapi dampaknya dapat diamati dengan jelas misalnya perubahan yang signifikan di daerah aliran sungai, pesisir pantai dan lingkungan pesisir secara umum (**Gambar 3, 4 dan 5**).

.....bersambung ke hal 17

..... Sambungan dari halaman 5

“Bur, Nden, Sem Mikindewa Membow”



Gambar 3 (atas). Kerusakan aliran sungai
Gambar 4 (tengah). Pembangunan jalan di pesisir Kepala
Burung Papua
Gambar 5 (bawah). Abrasi di sekitar KKLD
(Foto: Freddy P.)

Bentuk ancaman lain terhadap kawasan pesisir Kepala Burung yaitu kombinasi berbagai dampak akibat perubahan iklim “*climate change*” antara lain peningkatan suhu permukaan air laut, fluktuasi perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut. Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan memperkirakan perubahan iklim global sangat berdampak terhadap peningkatan erosi di kawasan pesisir, peningkatan frekuensi terjadinya badai dan banjir dan penambahan intensitas

penetrasi air laut ke aliran air tawar. Bentuk ancaman ini pada akhirnya akan meningkatkan kematian sejumlah biota laut termasuk biota yang dilindungi di KKLD Abun seperti penyu belimbing. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus berlangsung hal ini dapat menjadi ancaman yang serius terhadap penghidupan dan ketahanan pangan masyarakat di sekitar kawasan.

MASA DEPAN KKLD

Dalam berbagai diskusi informal dengan masyarakat, sempat terlontar bahwa manfaat terbentuknya KKLD secara langsung tidak mereka rasakan. Sejak dahulu mereka secara turun temurun sudah diajarkan dan mengerti bagaimana memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan. Kebutuhan mendasar masyarakat dengan tekanan ekonomi yang sangat berat saat ini adalah uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, dan berobat ketika mereka sakit. Di sisi lain perputaran uang tunai di desa sangat minim sekali. Hal ini wajar karena untuk mencapai ibukota kabupaten satu-satunya akses adalah menggunakan transportasi laut yang melayani desa-desa di Kepala Burung setiap dua minggu sekali atau bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Kalaupun mereka bisa memanen hasil pertanian dan perkebunan, kemana hasil tersebut dapat segera dipasarkan? Selain merupakan bahan makanan yang tidak tahan lama disimpan, tetangga ataupun masyarakat sekitar juga memanen hasil yang sama dari lahan pertanian mereka. Artinya hasil panen tersebut tidak dapat dipasarkan secara lokal sehingga mau tidak mau harus dikirim keluar desa.

Karena itu tidak mengherankan jika Spiteri dan Nepal (2006) mengungkapkan bahwa meskipun konservasi adalah tujuan utama, usaha yang maksimal sangat dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa kompensasi dan insentif adalah tepat sasaran dan diterima oleh mereka dengan pendapatan yang sangat terbatas. Kenyataan menunjukkan bahwa bekerja dengan komunitas lokal membutuhkan komunikasi yang efektif dan hal ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Dengan demikian sangat penting untuk memperhatikan tujuan dan sasaran program konservasi sehingga bilamana diperlukan, intervensi dapat dilakukan untuk memahami kebutuhan lokal dan nilai-nilai dari sistem yang berlaku.

Dengan membangun pengertian yang saling menguntungkan kesalahan paham dapat dicegah. Hampir setiap orang dapat menerima pentingnya konservasi bagi kehidupan, tetapi setiap budaya juga menganut konsep etika konservasinya sendiri-sendiri. Meskipun ada perdebatan yang serius tentang dampak sosial program konservasi dan keberhasilan pendekatan pemberdayaan masyarakat terhadap program konservasi, konsep dan agenda yang jelas dibutuhkan jika kebijakan konservasi dan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan bersama-sama. Karena itu pemberdayaan pemerintahan dan komunitas setempat untuk pengelolaan sumberdaya yang ada menjadi sangat penting untuk masa depan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan masyarakat di KKLD sekitar Kepala Burung Papua. ●●

^{1 & 2} Staf Pengajar & Mahasiswa Fakultas Peternakan Perikanan & Ilmu Kelautan UNIPA Manokwari; ³ Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIPA.